



Lingkungan Strategis Perlu Ditelaah dan Dikaji

“Perkembangan lingkungan strategis saat ini sulit diprediksi karena ketidakstabilan yang terjadi, sehingga dinamika politik maupun keamanan menurut Gubernur Lemhannas RI, menjadi corak yang paling dominan yang dihadapi oleh setiap negara di dunia.”

Pernyataan tersebut diungkapkan Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, saat membuka acara *Roundtable Discussion* yang berjudul “Perkembangan Lingkungan Strategik Tahun 2013” pada hari Senin (25/2) di Ruang Rapat Nusantara I, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

Bersambung ke hal. 2



Dinamika perkembangan lingkungan strategis memang selalu membawa implikasi, baik positif maupun negatif, secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat mempengaruhi jalannya pembangunan nasional yang sedang terlaksana saat ini.

Gubernur melihat pengaruh perkembangan lingkungan strategis terhadap penyelenggaraan negara dapat menyangkut aspek-aspek astagatra, gatra statis (demografi, geografi dan sumber kekayaan alam) ataupun gatra dinamis (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan).

Hal inilah yang menjadi alasan mendasar setiap negara perlu melakukan penelaahan dan pengkajian perkembangan lingkungan strategisnya masing-masing, baik dalam lingkup global, regional maupun nasional agar negara dapat menyusun strategi dan kebijakan yang tepat untuk kepentingan nasionalnya.

Roundtable Discussion yang di moderatori Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.IP, menghadirkan para pembicara dan penanggung yang berkompeten di bidangnya. Hadir sebagai Pembicara, Direktur Pelaksana ECONIT Dr. Hendri Saparini, Dosen Fakultas Sosiologi UI Iwan Gardono Sujatmiko, dan Direktur Executive EODAS Dr. Conny Rahakundini. Sedangkan Penanggung adalah Peneliti CSIS Dr. Alexandra Retno Wulan, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Prof. Dr. Sudaryono, SU, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ekonomi Lemhannas RI Prof. Dr. Miyasto, SU dan Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kementerian ESDM Dr. Marwansyah Lobo Balia, M.Sc.

Gubernur berharap *Roundtable Discussion* ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang cerdas sebagai sumbang saran dan masukan guna menyempurnakan naskah kajian tentang lingkungan strategis tahun 2013.

Selain Pembicara dan Penanggung, turut hadir Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, dan Pejabat undangan lainnya.

Menjaring Pejabat Publik yang Bersih, Kompeten dan Melayani



Foto : Humas Lemhannas

Menjelang akhir tahun 2012 yang lalu, Gubernur DKI Joko Widodo mengambil kebijakan yang menarik perhatian publik dan pemerintah, yaitu adanya lelang jabatan lurah, camat dan jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta.

Hal tersebut menjadi inspirasi tema yang dibahas dalam dialog

Daftar Isi



1 Lingkungan Strategis Perlu di Telaah dan di Kaji



2 Menjaring Pejabat Publik yang Bersih Kompeten dan Melayani



3 *Intellectual Exercise* Dewan Pengarah Lemhannas RI



4 Etika Pemerintahan dalam Membangun *Good Governance*



5 Tenaga Ahli pengajar dan Tenaga Profesional Butuh *High Impact Learning Techniques*



6 Sosialisasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



7 *Out Bond* menjaga *networking* dan soliditas



8 *Video Teleconference* Gubernur Lemhannas RI – CDSS Australia



9 Nilai-nilai dan Wawasan Kebangsaan Merupakan Prasyarat Mutlak.



10 Junjung Tinggi Kejujuran, Moralitas Dan Etika Akademik



11 Harapan Masyarakat, Merupakan Tantangan Bagi Lemhannas



12 Pemimpin Perlu Memahami dan Membumi dengan Keinginan dan Harapan Rakyat

Redaksi

Pengarah :

Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Penanggung Jawab :

Brigjen TNI Sahat Aritonang.

Redaktur :

Megawarni Simamora, S.E, M.M.

Penyunting/Editor :

Letkol Caj G.T. Situmorang.

Redaktur Pelaksana :

Bambang Iman Aryanto, S.T., Trias Noverdi, S.S.,

Endah Heliana, S.Sos.

Desain Grafis & Fotografer :

Arianto S.H., Sertu Syafrizal.

Sekretariat :

Linda Purnamasari S.Sos., Gatot, Indah Winarni.

Distribusi :

Letkol Inf. Sumurung, Lettu Cba Supriyono, Suryadi.

Alamat Redaksi :

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan

Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

kebangsaan yang diselenggarakan oleh RRI Pro 3 bekerjasama dengan Lemhannas RI pada hari Rabu (27/2) di Auditorium Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI Lt. 2, Jakarta. Hadir sebagai narasumber Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, Direktur Utama LPP RRI R. Niken Widiastuti, dan perwakilan dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dialog kebangsaan disiarkan langsung oleh RRI Pro 3, membahas tentang sistem promosi terbuka atau “lelang jabatan” yang diharapkan bisa benar-benar menjadi cara untuk menjaring pejabat publik yang bersih, kompeten dan melayani, bukan menjadi permasalahan baru dalam birokrasi pemerintahan.

Promosi terbuka untuk jabatan struktural tersebut merupakan salah satu langkah strategis dalam mengubah birokrasi dari zona nyaman (*comfort zone*)

ke zona kompetitif (*competitive zone*). Hal ini juga untuk menghilangkan berbagai praktik KKN yang sejauh ini sering terjadi. Bahkan, seiring dengan euphoria otonomi daerah, banyak jabatan struktural di kabupaten/kota yang dijadikan pundi-pundi oleh sang bupati/walikota.

Dialog yang dimoderatori oleh Maulana Isnarto ini secara substansi membahas tentang nilai plus dan minus “lelang jabatan”, hambatan dan pengaruh terhadap sistem jenjang karir khususnya bagi pegawai negeri sipil.

Namun yang menjadi perhatian adalah jika pelaksanaannya tidak diatur dengan baik dan transparan, “lelang jabatan” ini justru akan membuka peluang kesimpangsiuran pengaturan pejabat publik. Untuk itu perlu dibahas lebih jauh tentang aturan pelaksanaannya danantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Dialog kebangsaan ini diikuti oleh beberapa pejabat dari Lemhannas RI, LPP RI, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX, dan undangan lainnya.

Intellectual Exercise Dewan Pengarah Lemhannas RI

Pengasahan kemampuan seorang Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional di Lingkungan Lemhannas RI perlu dilakukan guna menumbuhkembangkan kehidupan akademiknya.

Intellectual Exercise yang diselenggarakan pada hari Rabu (27/2) di Gedung Pancagatra Lt. III Timur Lemhannas RI ini pada dasarnya selain guna mengasah *knowledge* dan *skills* para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional, kegiatan tersebut merupakan monitoring dan evaluasi implementasi dari kebijakan umum Dewan Pengarah Lemhannas RI.

Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA selaku Koordinator Dewan Pengarah Lemhannas RI ini, mengharuskan para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI untuk memaparkan sebuah makalah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing kemudian didiskusikan.



Foto : Humas Lemhannas

Dalam *Intellectual Exercise* kali ini, menghadirkan 3 (tiga) orang pemapar yakni, **pertama**, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Jana Tjahjana Anggadiredja yang memaparkan tentang “Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan Perspektif Wasantara dan Ketahanan Nasional”; **kedua**, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Pertahanan Keamanan Lemhannas RI Irjen Pol Lindung Simanjuntak dengan tema “Optimalisasi Penanganan Konflik Sosial guna Memantapkan Stabilitas Keamanan”; **ketiga**, Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan Lemhannas RI Dr. Adi Sujatno, Bc.I.P, SH, MH yang mengangkat tema “Harapan Rakyat Terhadap Kualitas Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014”

Selain dihadiri oleh beberapa anggota Dewan Pengarah, acara tersebut dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Utama Lemhannas RI, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI serta para undangan lainnya.



Foto : Humas Lemhannas

Etika Pemerintahan dalam Membangun Good Governance

Yakin, teladan, kerja keras, konsekuen, dan konsisten. Kelima hal inilah yang menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Azwar Abubakar merupakan syarat dari seorang pemimpin. Hal ini diungkapkan pada saat ia memberikan materi ceramahnya kepada para peserta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) VII Lemhannas RI tahun 2013 pada hari Senin (4/3) di Gedung Tri Gatra Lt. III Barat, Lemhannas RI.

Terkait dengan *good governance*, mengandung makna tata pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan supremasi hukum sebagai landasan utamanya. Menurutnya, inilah suatu nilai (*value*) untuk mengatur suatu pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat.

Good governance merupakan kondisi ideal yang menjadi impian setiap negara, dimana tiadanya praktik KKN, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, kompeten dan akuntabel, hilangnya peraturan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum.

Pada ceramah yang diikuti oleh 38 orang pimpinan daerah tersebut juga membahas tentang reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.

Menurutnya Kementerian PAN RB RI telah menetapkan 5 (lima) Agenda untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi; **pertama**, Percepatan Reformasi Birokrasi; **kedua**, Zona Integritas; **ketiga**, Manajemen Berbasis Kinerja (SAKIP/LAKIP); **keempat**, Peningkatan Pelayanan Masyarakat; **kelima**, Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal percepatan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN RB RI juga telah menetapkan 9 (sembilan) program, yaitu: (1) Penataan Struktur Birokrasi, (2) Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS, (3) Penataan Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka, (4) Peningkatan Profesionalisme PNS, (5) Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik, (6) Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik, (7) Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur, (8) Peningkatan Kesejahteraan SDM Aparatur Negara, dan (9) Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur Negara.

Untuk memonitor dan mengevaluasi semua hal tersebut, menurut Menteri PAN RB sudah diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dari sinilah dapat dilakukan penilaian tentang kesiapan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri, *online* dan *real time* oleh masing-masing kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Penilaian Mandiri tersebut juga dapat mengidentifikasi kekuatan/kelemahan instansi, meningkatkan kinerja instansi, meningkatkan motivasi dan kepekaan aparatur dan juga dapat sebagai *benchlearning/* proses pembelajaran. Menurut Menteri PAN RB RI, **k e s e m u a n y a** inilah yang akan dapat mendorong **i n s t a n s i** pemerintah untuk lebih fokus pada hasil yang benar - benar dirasakan oleh masyarakat.



Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Profesional Butuh High Impact Learning Techniques

Foto : Humas Lemhannas

“Sebagai bangsa yang memiliki budaya luhur, seharusnya kita mampu mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia”, ucap Gubernur Lemhannas saat membuka acara *Sharing Session Program Effective Learning Methods* pada hari Rabu (13/3) di Gedung Trigatra Lt. III Lemhannas RI.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA hal tersebut mengakibatkan adanya konsekuensi untuk terus dilaksanakannya pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh masyarakat. Hal ini juga merupakan salah satu unsur utama dalam *nation and character building* dalam rangka membentuk bangsa Indonesia yang memiliki kehormatan dan jatidiri, bermartabat, rela berkorban dan berjuang demi bangsa dan negaranya, dan juga menghargai negara lain.

Guna mendukung penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini, Lemhannas RI memandang perlu menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional. Melalui kerjasama dengan Solusi Jalan *Strategis Consulting (SJSS)*, Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan *Sharing Session Program Effective Learning Methods* tersebut.

Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Profesional hadir sebagai peserta dalam kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diarahkan bukan hanya cukup untuk menjadi

Tenaga Pengajar atau fasilitator yang baik, karena semua itu belum memberikan dampak yang dahsyat dan hebat sebelum disinergikan dengan pemahaman yang benar terhadap kebutuhan peserta didik dan kesanggupan untuk mendampingi peserta dalam proses belajar secara aktif, melalui penggunaan *High Impact Learning Techniques*.

Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana tukar-menukar pengalaman dan pengetahuan terkait metode pengajaran maupun pembelajaran. Selain itu, Gubernur menaruh harapan besar bahwa setelah pelatihan ini, peserta akan memiliki keterampilan dalam merancang presentasi, mampu memilih metode presentasi yang terbaik, mampu bertindak profesional, menjadi motivator, bersikap pro aktif dan komunikatif, serta memiliki karakter dan kemampuan yang dapat dijadikan panutan dan teladan bagi peserta, meningkatnya kepiawaian menggunakan teknik-teknik komunikasi verbal dan non verbal, meningkatnya kecermatan dan kebijakan dalam mengendalikan situasi serta meningkatnya kekuatan personal para peserta pelatihan.

Ke depannya, Lemhannas RI sangat menaruh harapan yang besar kepada para peserta yang juga menjadi Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Profesional ini untuk dapat mengimplementasikan pengalaman, pengetahuan, keterampilan yang diperoleh selama pelatihan tersebut.

Sosialisasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



“**K**ondisi dan perkembangan zaman memang telah membuat kehidupan sosial kemasyarakatan semakin dinamis dan memberikan konsekuensi kepada segenap lembaga pemerintah termasuk Lemhannas RI, untuk dapat memberikan pelayanan publik dengan baik”.

Hal itu terungkap pada saat Sekretaris Utama Lemhannas RI Dr. Chandra Manan Mangan, M.Sc memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada hari Rabu (13/3) di gedung Asta Gatra Lt.III Timur.

Sosialisasi yang diikuti para pejabat eselon I, II, III, IV dan staf unit kerja Lemhannas RI ini, merupakan tindak lanjut yang dilakukan Lemhannas RI dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB kepada para pejabat Kementerian dan Lembaga pada Februari lalu.

Pada kesempatan itu juga Sekretaris Utama

Lemhannas RI memberikan penekanan yang perlu mendapat perhatian yaitu **pertama**, pentingnya pelaksanaan sosialisasi UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; **kedua**, bahwa pembicaraan tentang undang-undang tidak terlepas dari aspek hukum yang mengatur hak dan kewajiban badan hukum serta warga negara; dan **ketiga**, kepada unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang kerja sama serta penatalaksanaan organisasi, diminta menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan guna terbentuknya pengorganisasian dan kegiatan pelayanan publik.

Sosialisasi ini sendiri menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN dan RB yaitu Kepala Bidang Analisis & Penyusunan Kebijakan Kedepan Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, Ibu Noviana Andrina, SH, M.AP.

Dalam penjelasannya, beberapa hal disampaikan diantaranya adalah Kementerian / Lembaga harus membuat standar pelayanan publik dan sistem informasi pelayanan publik dan perlunya perubahan mindset personil lembaga negara dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar profesionalisme, serta adanya konsekuensi hukum atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dari mulai sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Sekretaris Utama Lemhannas RI sendiri mengharapkan dengan diadakannya acara ini akan diperoleh kesamaan, baik dalam pemahaman tentang pelayanan publik maupun dalam penyikapan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Out Bond menjaga *networking* dan soliditas

Setelah menjalani *off campus* selama 1,5 bulan, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX Lemhannas RI, sebelum menjalani aktivitas *on campus* mereka dibekali dengan pelatihan *out bond* selama 3 (tiga) hari di SPN Lido Polda Metro Jaya, Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan pelatihan *out bond* yang dimulai sejak hari Rabu (13/3) ini dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA di gedung Trigatra Lt. III Timur Lemhannas RI. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, Kepala (SPN) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Markilat dan pejabat undangan lainnya.

Pada dasarnya kegiatan pelatihan ini diselenggarakan untuk menjaga *networking* dan solidaritas sesama peserta. Selain itu pula, agar dapat memberikan pengalaman nyata untuk meningkatkan potensi diri dalam rangka memelihara sikap, perilaku positif, kreativitas, kejujuran, integritas, disiplin dan emosional serta spiritual.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, hasil dari peningkatan potensi diri tersebut dianggap penting untuk diaktualisasikan selama mengikuti pendidikan di Lemhannas RI, terutama dalam hal proses pembelajaran berupa ceramah, diskusi kelompok, diskusi antar kelompok termasuk pada kegiatan studi strategis, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Terciptanya hubungan emosional, saling pengertian, semangat integrasi, soliditas dan kebanggaan adalah harapan-harapan yang diinginkan usai pelaksanaan kegiatan pelatihan *out bond* terutama di antara sesama peserta.



Foto : Humas Lemhannas



Foto : Humas Lemhannas



Foto : Humas Lemhannas

Foto : Humas Lemhannas

Video Teleconference Gubernur Lemhannas RI – CDSS Australia

Jum'at (15/3) Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA melaksanakan *Video Teleconference* dengan *Principal The Centre for Defence and Strategic Studies (CDSS)* Mr. Ian Errington, AM, CSC dan *Commander Australian Defence College (ADC)* Major General Craig Orme AM, CSC di Ruang TOC Telematika, Gedung Astagatra Lt. VI Lemhannas RI.

Pada *Video Teleconference* ini, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hubungan Internasional, Kepala Biro Kerja Sama, dan Plt. Kepala Biro Telematika. Selain itu, hadir pula pihak dari Kedutaan Besar Australia yang mewakili Athan Australia yaitu, Mr. Guy Boekenstein dan Major Penny dari *Woman Army Corps (WAC)*.

Dalam *Teleconference* tersebut, dibahas beberapa hal diantaranya tentang optimilisasi komunikasi melalui Video Teleconference, pembahasan *Memory of Understanding* yang akan disepakati, penyelenggaraan seminar dengan topik khusus (*Laut Cina Selatan, Maritime Territory, Energy Security, Radicalism, dan Food Security*) pemberdayaan

alumni baik alumni dari Lemhannas RI maupun dari CDSS, dan penguatan kemampuan bahasa Inggris bagi staf Lemhannas RI

Terkait dengan *Memory of Understanding*, Gubernur Lemhannas RI mengatakan perlu adanya pembahasan Klausul lebih lanjut, agar dapat di tindaklanjuti seperti pelaksanaan seminar Bilateral dan sekaligus memasukan Program pengajaran bahasa Inggris yang berkelanjutan. Selain itu juga, perlu dilakukan pemberdayaan alumni baik dari Lemhannas RI maupun CDSS agar hubungan bilateral kedua negara semakin baik, khususnya bidang pertahanan keamanan, ekonomi dan budaya.

Dalam pembicaraan tersebut, Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar Australia di Jakarta, yang telah membantu dengan menyediakan tenaga pengajar bahasa Inggris bagi 50 orang Staf Lemhannas RI secara bertahap dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi staf Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas

Nilai-nilai dan Wawasan Kebangsaan Merupakan Prasyarat Mutlak



“Sebagai bangsa yang multikulturalisme dan memiliki keragaman suku, bahasa, agama, etnis dan golongan, nilai-nilai dan wawasan kebangsaan merupakan prasyarat mutlak yang harus senantiasa dijaga demi persatuan bangsa serta tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pemerintah Daerah Angkatan ke-34 Tahun 2013 yang diselenggarakan pada hari Senin (18/3), di Auditorium Lemhannas RI.

Acara pemantapan yang berlangsung selama satu minggu ini, diikuti oleh 60 peserta berasal dari DPRD Kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi). Selama itu, para peserta akan menerima materi pemantapan yang terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Multikulturalisme/kemajemukan suatu bangsa merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa, namun disisi lain hal ini dapat menjadi potensi konflik sosial bila tidak dikelola dengan baik, dan akan menjadi kerawanan bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta berdampak negatif pada pembangunan bangsa.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, disinilah peran dari Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pemerintah Daerah sebagai pengemban amanat rakyat untuk dapat memahami dan menghayati kekuatan positif dari multikulturalisme dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu juga, para peserta harus memiliki kemampuan memilah dan memilih berbagai kepentingan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan kelompok maupun golongan.

Terkait demokrasi, Gubernur Lemhannas RI mengatakan demokrasi akan berjalan dengan baik, bila didukung oleh stabilitas politik yang mantap dan sehat.

“stabilitas politik hanya akan bisa terwujud, bila budaya politik yang dikembangkan selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa”, jelas Gubernur Lemhannas.

Pola berpikir yang komprehensif, integral dan holistik; Sikap antisipatif, kooperatif dan sinergik terhadap kepentingan rakyat; Kepekaan dan kepedulian terhadap berbagai konflik; Komitmen yang tinggi terhadap pembangunan nasional demi ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan rakyat; dan etika berpolitik yang sesuai dengan 4 (empat) konsensus dasar bangsa merupakan beberapa hal yang diharapkan dari acara pemantapan ini.

Acara Pembukaan dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, para Tenaga Ahli Pengajar dan Pengkaji, Pejabat dan jajaran staf kepengurusan dari Adeksi serta undangan lainnya.





Foto : Humas Lemhannas

Junjung Tinggi Kejujuran, Moralitas dan Etika Akademik

Senin (18/3), bertempat di Gedung Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI menyelenggarakan upacara pembukaan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) L Tahun 2013.

Acara tersebut resmi dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA dihadiri oleh para pejabat teras Lemhannas RI, seperti Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, para Tenaga Ahli Pengajar dan Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI. Selain itu, hadir pula Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksdya TNI Haribowo dan para pejabat yang mewakili kementerian/ instansi asal peserta.

PPRA L yang mulai diselenggarakan ini merupakan salah satu wujud dari tugas Lemhannas RI untuk membantu Presiden dalam hal penyelenggaraan pendidikan penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional yang nantinya diharapkan akan mampu berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal.

Oleh karena itu, Lemhannas RI dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun global, mulai tahun 2013 ini, melakukan penajaman tugas untuk mempersiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional

yang lebih kepada pembentukan karakter negarawan, memiliki pengetahuan/wawasan strategis serta terampil dalam memecahkan masalah-masalah strategis lingkup nasional, regional dan global.

PPRA L yang kini berlangsung selama 7,5 bulan, diikuti oleh 80 orang peserta berasal dari berbagai latar belakang profesi, disiplin ilmu yang berkecimpung di lingkungan birokrat pusat dan daerah, TNI, Polri, Akademisi dan Organisasi Kemasyarakatan. Berbagai latar belakang ini, diharapkan mampu mendinamisasikan proses pendidikan yang akan berlangsung nanti sehingga dapat menghasilkan dan membentuk watak dan karakter para pimpinan tingkat nasional yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan visioner.

Dengan mekanisme pendidikan *off campus* selama 1,5 bulan dan *on campus* selama 6 bulan, peserta akan dapat mengarahkan dan mampu membentuk pola budaya kerjasama dan menyelaraskan keragaman pemikiran yang dimiliki setiap peserta menuju *The Ideas Incorporated*.

Gubernur Lemhannas RI menekankan kepada para peserta untuk senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, moralitas dan etika akademik selama proses pendidikan seperti dalam hal penyelesaian berbagai kewajiban maupun penugasan yang diberikan lembaga agar tujuan dan sasaran diselenggarakan ini dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.



Foto : Humas Lemhannas

Harapan Masyarakat, Merupakan Tantangan Bagi Lemhannas RI



Foto: Humas Lemhannas

Lemhannas RI, pada hari Senin, (18/3) menyelenggarakan Upacara Bendera bulanan yang diikuti oleh segenap personil Lemhannas RI dan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke 49 di lapangan tengah Lemhannas RI.

Upacara Bendera ini mencerminkan wujud rasa nasionalisme dan perilaku cinta tanah air, menghargai pahlawan, menumbuhkan sikap kedisiplinan, dan juga menumbuhkan nilai saling menghormati dan menghargai dan sekaligus sebagai salah satu sarana komunikasi antara pimpinan dengan personil Lemhannas RI..

Bertindak selaku inspektur upacara, Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA mengatakan dalam amanatnya bahwa Lemhannas RI semakin sering menerima harapan untuk peran yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sekaligus merupakan sebuah tantangan bagi Lemhannas RI untuk mampu memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan bangsa yang terkait dengan ketahanan nasional.

“Dengan predikat *State Think Tank* yang melekat pada Lemhannas RI tentu harus menyikapi hal itu secara bijaksana dan mampu merespon harapan tersebut secara proporsional dan profesional melalui produk kajian yang berkualitas untuk memberikan solusi serta melakukan diseminasi nilai-nilai kebangsaan yang kita sebut dengan konsensus nasional”, jelas Gubernur.

Kemudian Gubernur juga mengingatkan pada unit-unit kerja terkait pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik agar dilakukan percepatan langkah-langkah guna merealisasikan penyediaan berbagai produk administrasi yang dibutuhkan. Hal tersebut untuk menyikapi rencana penilaian yang akan dilakukan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan dua unit kerja

lainnya.

Terkait dengan pembinaan personel, diharapkan seluruh personel Lemhannas RI mengetahui dan memahami Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013, diantaranya tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014. Sehingga sangat diperlukan kesiapan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar setiap PNS memiliki rencana maupun target kerja setiap tahun sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Gubernur juga menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan *Assessment Center* bagi keseluruhan personel sebagai organ dan sarana pembinaan karir di lingkungan Lemhannas RI. Selain itu pula, menyinggung terkait Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret, Gubernur mengatakan bahwa seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan sumbangsih yang tidak kecil dalam ilmu pengetahuan, politik, ekonomi serta sosial budaya, patut diapresiasi dan Lemhannas RI perlu turut serta meningkatkan pewacanaan maupun pengkajian tentang peningkatan peran perempuan.

Sebagai generasi penerus bangsa sekaligus sebagai abdi negara, wajib untuk memelihara semangat nasionalisme dan meningkatkan jiwa patriotisme demi kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu, semangat nasionalisme harus dibangun secara kreatif dan inovatif.

Hadir dalam Upacara ini adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar dan Pengkaji serta Tenaga Profesional.

Pemimpin Perlu Memahami dan Membumi dengan Keinginan dan Harapan Rakyat



Foto : Humas Lemhannas



“Tidak dapat disangkal, bahwa pemimpin-pemimpin partai politik kita dalam masa 10 tahun yang akhir ini gagal dalam melaksanakan tugasnya. Mereka lebih banyak mengabaikan dasar-dasar Pancasila dari menaatinya. Dan akibatnya ialah bahwa Indonesia makin jauh dari cita – citanya”.

Itulah sebuah kutipan dari seorang tokoh pendiri bangsa Moh. Hatta dalam bukunya *Demokrasi Kita* pada tahun 1960 yang mengawali ceramah Marsdya TNI Dede Rusamsi selaku Wakil Gubernur Lemhannas RI kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) L pada hari Selasa (19/3) di Gedung Panca Gatra Lt. III Timur Lemhannas RI.

Dalam buku Moh. Hatta tersebut dinyatakan bahwa energi bangsa harus terserap untuk membangun pengaruh dan kepentingan partai dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih hakiki, yakni kesejahteraan.

Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa saat ini para pemimpin perlu memahami telah terjadi pergeseran-pergeseran seperti Globalisasi Pasar dan teknologi; Munculnya Komunikasi Universal; Demokratisasi Informasi / Harapan; Peningkatan Kompetisi secara Eksponensial; Pergeseran Penciptaan Kekayaan dari Modal Keuangan ke Modal Intelektual dan Sosial; Tenaga Kerja Bebas (*Free Agency*) dan Perubahan Terus Menerus.

Dalam ceramahnya di depan 80 peserta PPRA L Lemhannas RI, ia menjelaskan bahwa pemimpin nasional sebagai penggerak dan motivator seluruh komponen bangsa Indonesia yang majemuk harus memiliki sosok pemimpin dan kepemimpinan nasional yang memahami

dan membumi dengan keinginan dan harapan rakyat serta mampu membawa bangsa Indonesia setara dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain.

“sebagai pemimpin dan kepemimpinan nasional harus mendasarkan perilaku dan tindakannya dengan tetap berpedoman pada 11 azas kepemimpinan nasional (*Takwa, Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, Waspada Purba Wisesa, Ambeg Parama Arta, Prasaja, Satya, Gemi Nestiti, Belaka dan Legawa.*) yang berlandaskan : Kekeluargaan dan gotong royong; Persatuan dan Kesatuan; Kebersamaan serta Selaras, serasi dan seimbang”, tegasnya.

“Kompleksitas permasalahan pembangunan bangsa membutuhkan sosok pemimpin dan kepemimpinan nasional yang mampu berperan di depan (*Ing Ngarsa Sung Tulada*), di tengah (*Ing Madya Mangun Karsa*) dan di belakang (*Tut Wuri Handayani*) secara terpadu dan sinergis” lanjutnya lagi.

Secara esensial, kesebelas azas kepemimpinan tersebut mencerminkan landasan moral Pancasila yang mencakup: Moral *Takwa*; Moral *Kemanusiaan*; Moral *kebersamaan dan kebangsaan*; Moral *kerakyatan dan Moral keadilan*.

Ia berharap, untuk menghadapi era perubahan, pimpinan dan kepemimpinan nasional harus mampu secara cerdas mengkolaborasikan penerapan manajemen modern yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik ke-Indonesia-an dan dilandasi oleh perilaku kepemimpinan yang berpedoman pada 11 Azas Kepemimpinan Nasional yang didalamnya terkandung moral kepemimpinan Pancasila yang kuat.